

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2014



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Pedoman ini merupakan salah satu acuan pelaksanaan umum kegiatan yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai instansi yang mengemban tugas dan fungsi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Sebagai Pedoman Umum maka buku ini bersifat makro yang menggambarkan menu kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan prasarana dan sarana pertanian, termasuk cara pengelolaan anggaran, pelaksanaan dan sistem monitoring, pelaporan serta evaluasinya. Oleh karena itu Pedoman Umum ini dan juga Pedoman Teknis dari masing-masing kegiatan Direktorat lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian perlu dijabarkan lebih lanjut di tingkat Provinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bagi kegiatan yang dilaksanakan tingkat Provinsi. Demikian juga agar dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Teknis bagi kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Akhirnya, semoga Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ini dapat memberikan manfaat guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian di lapangan.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Jenderal,



Dr. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA
NIP. 19601024 1987031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	4
A. TUJUAN.....	5
B. SASARAN.....	6
C. STRUKTUR PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2014	8
1. Tingkat Pusat	8
2. Tingkat Propinsi.....	9
3. Tingkat Kabupaten/ Kota	10
III. PRIORITAS KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014.....	11
A. Tanaman Pangan	11
B. Hortikultura	13
C. Perkebunan	14
D. Peternakan	15
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2014	16
A. Mendukung Tanaman Pangan	17
B. Mendukung Hortikultura	30
C. Mendukung Perkebunan	34
D. Mendukung Peternakan	38
V. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI LINGKUP DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014.....	43
A. <i>Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP) II</i> Pinjaman <i>World Bank</i> (IBRDP).....	43
B. <i>Hibah Korea</i>	45

C.	<i>Sub Project-2 : Capacity Development For Climate Change Adaption Actins in Agriculture and Other Relevant Sectors. ...</i>	46
VI.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014.....	49
I.	Pelaporan dan Sistim Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)	51
A.	Jenis Laporan.....	51
B.	Instrumen Pelaporan Kegiatan pengelolaan lahan dan Air.....	52
C.	Mekanisme Pelaporan	56
II.	Pelaporan Keuangan (SAI)	59
VII.	REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) KEGIATAN PSP TA.2014	62
VIII.	INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN KEGIATAN/KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA.2014.....	65
IX.	PENUTUP	68
	LAMPIRAN	70

I. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terbentuk berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Kementerian Negara tanggal 14 April 2010. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tugas pokok: “Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian sesuai dengan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perluasan dan pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk, pestisida, dan alat

mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

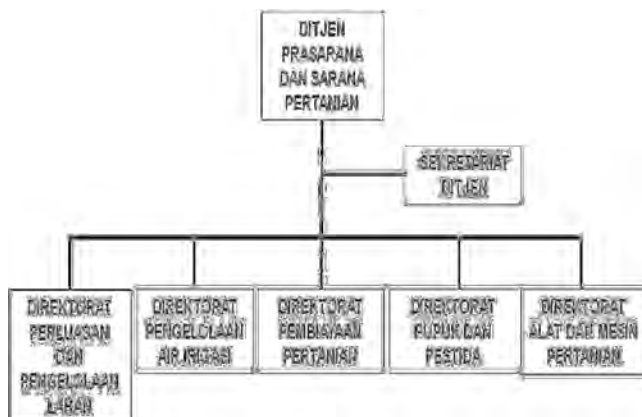
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mempunyai 6 Unit Kerja Eselon II yaitu :

1. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
2. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
3. Direktorat Pupuk dan Pestisida
4. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
5. Direktorat Pembiayaan Pertanian
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan *on farm* komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, maka program dan kegiatan Ditjen Prasarana Sarana Pertanian diarahkan fokus dalam memfasilitasi kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian di sub sektor Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian



Pengalokasian anggaran di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2014 sebagai berikut :

- Dana Dekonsentrasi yang dialokasikan ke propinsi digunakan untuk kegiatan non fisik (Koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan)
- Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota digunakan untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik pendukung yang disinergikan dengan dana sinergi program dari APBD kabupaten/Kota. Dana Tugas Pembantuan dititipkan pada satker dinas lingkup Pertanian Provinsi untuk dialokasikan kegiatan prasarana dan sarana pertanian di daerah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pembangunan sektor pertanian memiliki peran penting bukan hanya menyediakan pangan, namun juga berkaitan dengan akses pangan bagaimana kita memproduksi dan mengonsumsi pangan secara efisien dan berkelanjutan. Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya penyediaan pangan yang berkelanjutan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2014 diarahkan untuk mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2014 sesuai dengan tahapan dan prioritas kegiatan, disamping Pedoman Umum sebagai garis besar acuan setiap petugas pelaksana kegiatan prasarana dan sarana pertanian maka disusun pula rencana kerja pelaksanaan kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Rencana kerja yang disusun berpedoman kepada Jadwal Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 seperti pada lampiran Matrik Rencana Kerja

Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2014.

Adapun tujuan, sasaran dan struktur kegiatan prasarana dan sarana pertanian TA. 2014, secara garis besar adalah sebagai berikut :

A. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan infrastruktur pertanian mendukung kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan ;
2. Memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan ;
3. Mengendalikan laju alih fungsi lahan ;
4. Mendayagunakan lahan pertanian terlantar ;
5. Melakukan upaya konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian ;
6. Penguatan hak atas tanah ;
7. Melakukan upaya rehabilitasi jaringan air irigasi ;
8. Melakukan upaya pengembangan sumber air irigasi ;
9. Melakukan upaya konservasi air dan antisipasi anomali iklim ;
10. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan pengelola air ;

11. Meningkatkan koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah lahan, air serta prasarana dan sarana pertanian ;
12. Meningkatkan kualitas SDM pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian ;
13. Meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian;
14. Meningkatkan kemampuan pengelolaan UPJA
15. Melakukan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) ;
16. Melakukan fasilitasi pembiayaan pertanian dengan kredit program
17. Menumbuh kembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan penerima dana BLM-PUAP
18. Melaksanakan fasilitasi penyediaan pupuk dan pestisida.

B. SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya luas lahan pertanian dan intensitas pertanaman pada kawasan tanaman pangan 40.000 Ha, hortikultura 2.500 Ha, perkebunan 11.000 Ha dan peternakan 2.500 Ha ;
2. Terkendalinya laju alih fungsi lahan di 33 Propinsi

3. Terwujudnya pendayagunaan lahan pertanian terlantar, optimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian seluas 200.000 Ha ;
4. Meningkatnya penguasaan hak atas tanah sebanyak 1.300 Paket ;
5. Tercapainya pengembangan jaringan irigasi seluas 500.000 Ha ;
6. Tercapainya pengembangan sumber air irigasi sebanyak 280 Unit ;
7. Terwujudnya konservasi air dan antisipasi anomali iklim sebanyak 9.600 Paket ;
8. Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan pengelola air sebanyak 500 Paket ;
9. Terwujudnya peningkatan koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah lahan dan air ;
10. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian ;
11. Tercapainya peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian ;
12. Terwujudnya peningkatan kemampuan pengelolaan UPJA ;
13. Terwujudnya pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) pada 3.000 Gapoktan/Desa ;
14. Terlaksananya fasilitasi penyediaan pupuk dan pestisida di 33 Propinsi.

15. Terlaksananya fasilitasi pendaftaran pupuk dan pestisida

C. STRUKTUR PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2014

Struktur kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian pada TA. 2014 disusun berdasarkan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan dan anggaran kinerja secara hierarkis antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian secara nasional menjadi tanggung jawab satuan kerja (satker) pusat yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pokok kegiatannya mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan monitoring & evaluasi Propinsi. Sedangkan kegiatannya difokuskan pada: "Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian", dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;

- b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah penanggungjawab/ koordinator pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian secara nasional (propinsi seluruh Indonesia), bertugas sebagai koordinator Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/ Peternakan di Propinsi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

2. Tingkat Propinsi

Kegiatan pokok prasarana dan sarana pertanian ada di Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/ Peternakan Propinsi mencakup penyiapan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kabupaten/kota.

Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan di Propinsi adalah pendamping pelaksanaan

kegiatan prasarana dan sarana pertanian di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, bertugas sebagai koordinator Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan prasarana dan sarana pertanian.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan pokok pembangunan prasarana dan sarana pertanian ada di Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan kabupaten/kota mencakup penyiapan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian di tingkat lapangan.

Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan di Kabupaten/Kota adalah penanggungjawab/koordinator kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian di wilayahnya, bertugas sebagai pelaksana kegiatan prasarana dan sarana pertanian di tingkat lapangan.

III. PRIORITAS KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014

Prioritas Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2014 adalah tersedianya prasarana dan sarana pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Adapun prioritas kegiatan prasarana dan sarana pertanian secara rinci per aspek adalah sbb:

A. Tanaman Pangan

Prioritas kegiatan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2014 dalam mendukung produksi tanaman pangan terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. *Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan*

- a. Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Pendampingan ;
- b. Pengembangan Optimasi Lahan ;
- c. Pengembangan System of Rice Intensification (SRI) ;
- d. Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian.

2. *Aspek Pengelolaan Air Irigasi*

- a. Pengembangan Jaringan Irigasi ;

- b. Pemberdayaan Kelembagaan Petani ;
- c. Pengembangan Irigasi Perpipaian ;
- d. Pengembangan Pemasangan Fiber pada lahan sawah.

3. *Aspek Pupuk dan Pestisida*

- a. Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) ;
- b. Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida ;
- c. Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ;
- d. Pengembangan Pupuk Organik dan pembenah tanah ;
- e. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) ;
- f. Fasilitasi pendaftaran pupuk dan pestisida.

4. *Aspek Alat dan Mesin Pertanian*

- a. Bantuan Alsintan Traktor Roda 2 ;
- b. Bantuan Alsintan Pompa Air ;
- c. Bantuan Rice Transplanter ;
- d. Pengembangan dan Pembinaan UPJA ;
- e. Kerjasama TNI AD dalam rangka pengawalan Brigade Tanam.

5. *Aspek Pembiayaan Pertanian*

- a. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ;

- b. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan kredit program ;
- c. Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan penerima dana BLM-PUAP ;
- d. Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) ;
- e. Pengembangan Asuransi Pertanian Tanaman Padi.

B. Hortikultura

Prioritas kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2014 dalam mendukung produksi tanaman hortikultura terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- a. Perluasan Lahan Hortikultura ;
- b. Pengembangan Optimasi Lahan ;
- c. Pra/ Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian ;

2. Aspek Pengelolaan Air Irigasi

- a. Pengembangan Sumber Air ;
- b. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.

3. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

- a. Bantuan Cultivator.

4. *Aspek Pembiayaan Pertanian*

- a. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

C. Perkebunan

Prioritas kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2014 dalam mendukung produksi tanaman perkebunan terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. *Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan*

- a. Perluasan Lahan Perkebunan ;
- b. Pengembangan Optimasi Lahan ;
- c. Pra/ Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian.

2. *Aspek Pengelolaan Air Irigasi*

- a. Pengembangan Sumber Air ;
- b. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.

3. *Aspek Pupuk dan Pestisida*

- a. Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida.

4. *Aspek Pembiayaan Pertanian*

- a. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

D. Peternakan

Prioritas kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2014 dalam mendukung produksi peternakan terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- a. Perluasan Lahan Peternakan ;
- b. Pra Sertifikasi Lahan Peternakan.

2. Aspek Pengelolaan Air Irigasi

- a. Pengembangan Sumber Air ;
- b. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.

3. Aspek Pupuk dan Pestisida

- a. Pengembangan Pupuk Organik/UPPO/RPPO.

4. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

- a. Bantuan chopper.

5. Aspek Pembiayaan Pertanian

- a. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2014

Pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian mulai di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten harus terkait langsung dan secara sinergis mampu mendorong pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2014 sebagian besar dilaksanakan dengan pola bantuan sosial dan dilaksanakan secara "partisipatif", disamping juga ada yang dilaksanakan dengan pola kontraktual. Pelaksanaan kegiatan kontraktual mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta ketentuan lain yang berlaku. Sedangkan cara pelaksanaan kegiatan / mekanisme dan tata cara pengelolaan akun lembaga *Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang dan atau Barang* mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan no 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.

Adapun pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:

A. Mendukung Tanaman Pangan

Kegiatan prasarana dan sarana pertanian Tahun Anggaran 2014 untuk mendukung subsektor tanaman pangan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- a. Verifikasi dan Potensi Perluasan Areal Tanaman Pangan
 1. Identifikasi potensi pengembangan kawasan tanaman pangan ;
 2. Verifikasi pelaksanaan pendampingan perluasan sawah ;
 3. Verifikasi persiapan pelaksanaan perluasan sawah.

- b. Sosialisasi dan Koordinasi Perluasan areal Tanaman Pangan
 1. Penggandaan buku pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan ;
 2. Pengadaan buku pedoman teknis pendampingan perluasan areal tanaman pangan ;
 3. Pertemuan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Perluasan areal tanaman pangan;
 4. Pertemuan dalam rangka penyiapan Pembukaan Kawasan Tanaman Pangan ;
 5. Pertemuan dalam rangka Percepatan Perluasan areal tanaman pangan Bimbingan

teknis pendampingan perluasan areal tanaman pangan.

- c. Bimbingan teknis perluasan sawah
 - 1. Bimbingan teknis pendampingan perluasan areal tanaman pangan

- d. Monitoring dan Evaluasi Perluasan areal tanaman pangan
 - 1. Monitoring Perluasan areal tanaman pangan ;
 - 2. Monitoring pendampingan Perluasan Sawah ;
 - 3. Evaluasi perluasan sawah ;
 - 4. Evaluasi pendampingan areal tanaman pangan ;
 - 5. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi perluasan sawah.

- e. Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk perluasan Sawah
 - 1. Sosialisasi pelaksanaan survei kesesuaian lahan ;
 - 2. Survey kesesuaian lahan ;
 - 3. Monitoring pelaksanaan survey dan evaluasi lapang ;
 - 4. Profil Tanah ;
 - 5. Digitasi Peta ;

- f. Identifikasi lokasi dalam peningkatan produktivitas sawah baru
 - 1. Identifikasi Lokasi dalam peningkatan produktivitas sawah baru ;
 - 2. Pelaksanaan survey dan penelitian ;

3. Bimbingan teknis peningkatan produktivitas pada sawah baru ;
 4. Pendamping teknis dari provinsi ke lokasi ;
 5. Pencetakan dan perbanyak Buku Pedoman Budidaya padi.
- g. Pelatihan peningkatan produktivitas sawah baru
- h. Workshop peningkatan produktivitas sawah baru
- i. Monitoring dan evaluasi peningkatan produktivitas sawah baru
1. Monitoring peningkatan produktivitas sawah baru ;
 2. Pendampingan dari Propinsi ;
 3. Evaluasi peningkatan produktivitas sawah baru ;
 4. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.
- j. Optimasi Lahan
1. Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan diarahkan pada lahan-lahan sebagai berikut :
 - Lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan ;
 - Lahan pertanian dengan kesuburan yang rendah ;
 - Lahan pertanian yang mempunyai indeks pertanaman (IP) yang mempunyai potensi bisa di tingkatkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan

- Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan ;
- Sosialisasi Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan ;
- Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi Lahan ;
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan ;
- Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan di daerah ;

3. Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan pertanian berupa :

- Pengolahan lahan adalah penyiapan bidang olah agar dalam kondisi siap tanam;
- Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur ;
- Penyediaan bibit saprodi ;
- Menerapkan kaidah konservasi pada lahan berlereng, membuat surjan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui bantuan sosial, agar sebesar-besarnya melibatkan masyarakat

petani setempat sebagai tenaga kerja dan meningkatkan rasa memiliki.

- k. Pengembangan SRI mendukung tanaman pangan
 - 1. Penyusunan Pedoman teknis pengembangan usahatani padi SRI ;
 - 2. Bimbingan Teknis pengembangan usahatani padi SRI ;
 - 3. Monitoring dan evaluasi pengembangan usahatani padi SRI ;
 - 4. TOT pengembangan SRI ;
 - 5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan usahatani SRI di daerah.
- Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Usahatani Padi SRI berupa :
- Pelatihan petani dengan metode sekolah lapang.
-
- l. Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
 - 1. Penyusunan Pedoman teknis Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian ;
 - 2. Bimbingan Teknis Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian ;
 - 3. Monitoring dan evaluasi Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian .

2. Aspek Pengelolaan Air Irigasi

a. Pengembangan Jaringan Irigasi

1. Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi.
 - Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan Jaringan Irigasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi
 - Penyusunan petunjuk teknis pengembangan Jaringan Irigasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
2. Bimbingan Pengembangan Jaringan Irigasi menunjang pengembangan Tanaman Pangan.
3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Irigasi menunjang Tanaman Pangan

b. Pemberdayaan Kelembagaan

1. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan Kelembagaan oleh Dinas Pertanian Propinsi, Petunjuk Teknis disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten penerima kegiatan
2. Penyusunan profil perkembangan Kelembagaan P3A Wilayah Sumatera
3. Bimbingan dan evaluasi kelembagaan petani pemakai air
4. Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif

5. Bimbingan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air
- c. Pengembangan Irigasi Perpipaan
 1. Penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Pengembangan Irigasi Perpipaan, oleh Dinas Pertanian Provinsi penerima kegiatan.
 2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpipaan oleh Dinas Pertanian Kabupaten lingkup pertanian penerima kegiatan.
 3. Bimbingan dan monitoring Pengembangan Irigasi Perpipaan
 - d. Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Lahan Sawah
 1. Penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Lahan Sawah, oleh Dinas Pertanian Provinsi penerima kegiatan.
 2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Lahan Sawah oleh Dinas Pertanian Kabupaten lingkup pertanian penerima kegiatan.
 3. Bimbingan dan monitoring Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Lahan Sawah.

3. Aspek Pupuk dan Pestisida

- a. Pembinaan Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
 - 1. Pengawasan pupuk;
 - 2. Apresiasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida;
 - 3. Koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida;
 - 4. Pengawasan pestisida.

- b. Pembinaan Kegiatan Pupuk An Organik
 - 1. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi;
 - 2. Monitoring penggunaan RDKK;
 - 3. Penyusunan kebijakan pupuk;
 - 4. Evaluasi teknis pendaftaran pupuk an organik;
 - 5. Pertemuan evaluasi dan perencanaan kebutuhan pupuk.

- c. Pembinaan Kegiatan Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
 - 1. Pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah;
 - 2. Identifikasi potensi pupuk organik dan pembenah tanah;
 - 3. Evaluasi teknis pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah;
 - 4. Monitoring dan evaluasi pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah;

- d. Pembinaan Kegiatan Pestisida Kimia dan Hayati
 - 1. Evaluasi pendaftaran pestisida;
 - 2. Rapat pleno komisi pestisida;
 - 3. Penyusunan konsep SK Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin Pestisida;
 - 4. Pertemuan koordinasi Lembaga Uji Mutu, Uji Efektivitas dan Uji Toksisitas Pestisida;
 - 5. Pertemuan koordinasi kajian pestisida terdaftar dan beredar;
 - 6. Pembinaan dan evaluasi penggunaan pestisida;

- e. Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 1. Rapat koordinasi KP3;
 - 2. Sinkronisasi pengawasan pupuk dan pestisida;
 - 3. Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida;
 - 4. Inventarisasi pupuk dan pestisida.

- f. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida.
 - 1. Sosialisasi penyelidikan tindak pidana UU. 19 Tahun 1992;
 - 2. Koordinasi penyelidikan tingkat Provinsi dengan korwas POLDA;
 - 3. Pembinaan peredaran pupuk dan pestisida;
 - 4. Penyelidikan tindak kasus pidana pupuk dan pestisida;
 - 5. Koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida.

- g. Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 1. Penyusunan peraturan Gubernur dan Bupati/Wali kota;
 - 2. Sosialisasi peraturan;
 - 3. Penyusunan RDKK;
 - 4. Evaluasi perencanaan kebutuhan dan penyerapan realisasi;
 - 5. Pembinaan, supervisi dan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi;
 - 6. Koordinasi ke Instansi terkait;
 - 7. Pertemuan/ rapat-rapat.

- h. Pendampingan Penyaluran Subsidi Pupuk Upsus Kedelai Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 1. Sosialisasi peraturan;
 - 2. Penyusunan CPCL;
 - 3. Evaluasi perencanaan kebutuhan dan penyerapan realisasi;
 - 4. Pembinaan, supervisi dan monitoring penyaluran BLP;
 - 5. Koordinasi ke Instansi terkait;
 - 6. Pertemuan/ rapat-rapat.

- i. Pengembangan Pupuk Organik Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1. Rapat Koordinasi;
 - 2. Pembinaan, inventarisasi dan evaluasi pengembangan pupuk organik;

- j. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
 - Penyusunan Pedoman teknis UPPO Unit Pengolah Pupuk Organik
 - Bimbingan Teknis UPPO Unit Pengolah Pupuk Organik
 - Monitoring dan evaluasi UPPO Unit Pengolah Pupuk Organik

4. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

- a. Bantuan Alsintan Traktor Roda 2, Pompa Air dan Rice Transplanter
 - 1. Penyusunan pedoman teknis Bantuan Alsintan Traktor Roda 2, Pompa Air dan Rice Transplanter
 - 2. Sosialisasi pedoman teknis Bantuan Alsintan Traktor Roda 2, Pompa Air dan Rice Transplanter
 - 3. Bimbingan teknis Bantuan Alsintan Traktor Roda 2 Pompa Air dan Rice Transplanter
 - 4. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan alsintan
 - 5. Monitoring dan evaluasi pengawasan Bantuan Alsintan Traktor Roda 2, Pompa Air dan Rice Transplanter

- b. Pembinaan dan Pengembangan UPJA
 - 1. Penyusunan pedoman teknis Pembinaan dan pengembangan UPJA
 - 2. Sosialisasi pedoman teknis Pembinaan dan pengembangan UPJA
 - 3. Bimbingan teknis dan Pembinaan dan pengembangan UPJA
 - 4. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan alsintan
 - 5. Monitoring dan evaluasi Pembinaan dan pengembangan UPJA

- c. Kerjasama TNI AD dalam rangka Pengawasan Brigade Tanam
 - 1. Penyusunan Pedoman Kerjasama TNI AD dalam rangka Pengawasan Brigade Tanam.
 - 2. Bimbingan teknis dan pendampingan Kerjasama TNI AD dalam rangka Pengawasan Brigade Tanam
 - 3. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka Kerjasama TNI AD dalam rangka Pengawasan Brigade Tanam
 - 4. Monitoring dan evaluasi Kerjasama TNI AD dalam rangka Pengawasan Brigade Tanam

5. Aspek Pembiayaan Pertanian

- a. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
 - 1. Koordinasi Instansi Terkait
 - 2. Penyusunan dan penggandaan pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
 - 3. Penyaluran dana BLM PUAP
 - 4. Sinkronisasi desa dan gapoktan PUAP
 - 5. Penyusunan Pedoman Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan Penerima dana BLM- PUAP

- b. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
 - 1. Koordinasi dengan instansi terkait dan Bank pelaksana
 - 2. Penyusunan PEDUM KKP-E dan KUR Kredit Program sektor Pertanian
 - 3. Bimbingan Teknis Fasilitasi Pembiayaan Pertanian melalui kemitraan.
 - 4. Monitoring dan evaluasi Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

- c. Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3)
 - 1. Koordinasi dengan instansi terkait
 - 2. Penyusunan PEDUM BP-3, Petunjuk Pelaksanaan Identifikasi dan verifikasi

petani/kelompok tani padi puso, Petunjuk teknis penyaluran BP-3

3. Monitoring dan evaluasi Fasilitas Pembiayaan Pertanian

d. Asuransi Pertanian

1. Koordinasi dengan instansi terkait
2. Penyusunan PEDUM Asuransi Pertanian
3. Pengumpulan data dan informasi
4. Fasilitas/ Sosialisasi Kegiatan Asuransi Pertanian.
5. Bimbingan Teknis.
6. Monitoring dan evaluasi kegiatan Asuransi Pertanian

B. Mendukung Hortikultura

Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian Tahun Anggaran 2014 untuk mendukung produksi hortikultura adalah sebagai berikut :

1. *Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan*

a. Sosialisasi dan Identifikasi Potensi Perluasan lahan Hortikultura

1. Sosialisasi pedoman teknis perluasan Lahan hortikultura
2. Koordinasi dengan instansi terkait.
3. Bimbingan teknis perluasan lahan hortikultura.

- b. Identifikasi potensi dan verifikasi perluasan lahan hortikultura .
 - 1. Identifikasi potensi perluasan lahan hortikultura.
 - 2. Verifikasi perluasan lahan hortikultura
 - c. Monitoring dan Evaluasi perluasan lahan hortikultura
 - 1. Monitoring perluasan lahan hortikultura
 - 2. Evaluasi perluasan lahan hortikultura
2. Pengembangan Optimasi Lahan

Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan diarahkan pada lahan-lahan sebagai berikut :

- Lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan
- Lahan pertanian dengan kesuburan yang rendah
- Lahan pertanian yang mempunyai indeks pertanaman (IP) yang mempunyai potensi bisa di tingkatkan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan

- Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan
- Sosialisasi Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan

- Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi Lahan
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan.
- Pelaksanaan kegiatan optimasi lahan di daerah

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui bantuan sosial, agar sebesar-besarnya melibatkan masyarakat petani setempat sebagai tenaga kerja dan meningkatkan rasa memiliki.

3. Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian

- a. Penyusunan Pedoman teknis Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
- b. Bimbingan Teknis Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
- c. Monitoring dan evaluasi Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian

2. *Aspek Pengelolaan Air*

a. Pengembangan Sumber Air

1. Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air oleh Ditjen PSP
- d. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan sumber air oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi

- e. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber air oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota
2. Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber Air
3. Monitoring dan Evaluasi pengembangan Sumber Air menunjang hortikultura

b. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

1. Penyusunan pedoman teknis konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh Ditjen PSP
- f. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim oleh Dinas lingkup pertanian Provinsi.
- g. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
2. Bimbingan Teknis kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim
3. Monitoring dan Evaluasi kegiatan konservasi air dan Antisipasi Anomali Iklim

4. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

a. Bantuan Cultivator

1. Penyusunan pedoman teknis Bantuan Cultivator.
2. Sosialisasi pedoman teknis Bantuan Cultivator .
3. Bimbingan teknis Bantuan Cultivator.
4. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan alsintan
5. Monitoring dan evaluasi pengawasan Bantuan Cultivator.

5. Aspek Pembiayaan Pertanian

a. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

1. Koordinasi Instansi Terkait
2. Penyusunan dan penggandaan pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
3. Penyaluran dana BLM PUAP
4. Sinkronisasi desa dan gapoktan PUAP
5. Penyusunan Pedoman Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan Penerima dana BLM- PUAP

C. Mendukung Perkebunan

Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian Tahun Anggaran 2014 untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan adalah sbb:

1. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- a. Identifikasi Potensi Perluasan Lahan Perkebunan
 - Identifikasi dan verifikasi perluasan lahan perkebunan
- b. Sosialisasi Pedoman Teknis Lahan Perkebunan
 - Penyempurnaan pedoman teknis perluasan lahan kawasan perkebunan
- c. Bimbingan Teknis Perluasan Lahan Perkebunan
- d. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Lahan Perkebunan

e. Optimasi Lahan

1. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan diarahkan pada lahan perkebunan yang sementara tidak diusahakan.

2. Komponen kegiatan

Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan perkebunan berupa :

- Pengolahan Lahan untuk penyiapan bidang olah agar dalam kondisi siap tanam
- Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui bantuan sosial, agar sebesar-besarnya melibatkan partisipasi

masyarakat petani setempat sebagai tenaga kerja dan meningkatkan rasa memiliki.

3. Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan

- Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan
- Sosialisasi Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan
- Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi Lahan
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan
- Pelaksanaan Optimasi Lahan di Daerah

2. *Aspek Pengelolaan Air Irigasi*

a. Pengembangan Sumber Air

1. Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air.
 1. Penyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan sumber air oleh Dinas Perkebunan Propinsi
 2. Penyusun petunjuk teknis pengembangan sumber air oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
2. Bimbingan Pengembangan sumber air menunjang pengembangan Perkebunan.
3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sumber air menunjang Perkebunan

4. Bimbingan Pengembangan sumber air menunjang Perkebunan
5. Bimbingan Pengembangan sumber air menunjang Perkebunan
6. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sumber air menunjang Perkebunan
7. Bimbingan pengembangan sumber air menunjang Perkebunan
8. Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber air dalam menunjang Perkebunan

b. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

1. Penyusunan pedoman teknis konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh Ditjen PSP
 - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim oleh Dinas lingkup pertanian Provinsi.
 - Penyusunan petunjuk teknis kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
2. Bimbingan Teknis kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim

3. Monitoring dan Evaluasi kegiatan konservasi air dan Antisipasi Anomali Iklim

3. Aspek Pupuk dan Pestisida

- a. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida.
 - 1. Sosialisasi penyelidikan tindak pidana UU. 19 Tahun 1992;
 - 2. Koordinasi penyelidikan tingkat Provinsi dengan korwas POLDA;
 - 3. Pembinaan peredaran pupuk dan pestisida;
 - 4. Penyelidikan tindak kasus pidana pupuk dan pestisida;
 - 5. Koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida.

- b. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
 - 1. Penyusunan Pedoman teknis UPPO Unit Pengolah Pupuk Organik
 - 2. Bimbingan Teknis UPPO Unit Pengolah Pupuk Organik
 - 3. Monitoring dan evaluasi UPPO Unit Pengolah Pupuk Organik

D. Mendukung Peternakan

Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian Tahun Anggaran 2014 untuk mendukung

peningkatan produksi peternakan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perluasan Lahan Peternakan

1. Penyempurnaan pedoman teknis perluasan lahan kebun HMT
2. Penyempurnaan pedoman teknis perluasan lahan padang penggembalaan
3. Sosialisasi perluasan lahan kebun HMT dan Padang Penggembalaan mendukung kawasan ternak potong
4. Sosialisasi Perluasan lahan Kebun HMT dan Padang Penggembalaan mendukung Kawasan Ternak Perah
5. Bimbingan Perluasan lahan Peternakan Kebun HMT dan Padang Penggembalaan mendukung Kawasan Ternak Potong
6. Bimbingan Perluasan lahan Kebun HMT mendukung Kawasan Ternak Perah

b. Inventarisasi Kebutuhan Sarana Kebun HMT dan Padang Penggembalaan

1. Inventarisasi Kebutuhan Sarana Kebun HMT dan Padang Penggembalaan

- c. Identifikasi dan verifikasi Potensi Perluasan lahan Peternakan
 - 1. Identifikasi dan verifikasi Potensi Perluasan Lahan Kebun HMT dan Padang Penggembalaan
 - 2. Identifikasi Potensi Perluasan Lahan Padang Penggembalaan

- d. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Lahan Peternakan
 - 1. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Lahan Kebun HMT dan Padang Penggembalaan pada Kawasan Ternak Potong
 - 2. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Lahan Kebun HMT dan Padang Penggembalaan pada Kawasan Ternak Perah
 - 3. Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
 - a. Penyusunan Pedoman teknis Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
 - b. Bimbingan Teknis Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
 - c. Monitoring dan evaluasi Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian

2. Aspek Pengelolaan Air Irigasi

a. Pengembangan Sumber Air

1. Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air.
2. Penyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan sumber air Dinas Peternakan Propinsi
3. Penyusun petunjuk teknis pengembangan sumber air oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota
4. Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber Air untuk menunjang pengembangan Peternakan.
5. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengembangan Sumber Air

b. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

1. Penyusunan pedoman teknis konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh Ditjen PSP
2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim oleh Dinas lingkup pertanian Provinsi.
3. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
4. Bimbingan Teknis kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim

5. Monitoring dan Evaluasi kegiatan konservasi air dan Antisipasi Anomali Iklim

3. Aspek Pupuk dan Pestisida

- a. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
 1. Penyusunan Pedoman teknis Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan RPPO.
 2. Bimbingan Teknis Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan RPPO.
 3. Monitoring dan evaluasi Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan RPPO.

4. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

- a. Bantuan Alsintan Chopper
 1. Penyusunan pedoman teknis Bantuan Alsintan Chopper.
 2. Sosialisasi pedoman teknis Bantuan Alsintan Chopper.
 3. Bimbingan teknis Bantuan Alsintan Chopper.
 4. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan alsintan
 5. Monitoring dan evaluasi pengawasan Bantuan Alsintan Chopper.

5. Aspek Pembiayaan Pertanian

- a. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
 1. Koordinasi Instansi Terkait
 2. Penyusunan dan penggandaan pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
 3. Penyaluran dana BLM PUAP
 4. Sinkronisasi desa dan gapoktan PUAP
 5. Penyusunan Pedoman Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan Penerima dana BLM- PUAP

**V. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI
LINGKUP DITJEN. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2014**

Pada TA. 2014 ada beberapa kegiatan kerjasama luar negeri (Pinjaman-Hibah Luar Negeri/ PHLN) di lingkup Ditjen. PSP, yaitu:

a. *Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP) II Pinjaman World Bank (IBRD)*

Program Water Resources and Irrigation Sector Mangement Program (WISMP) merupakan program bantuan pinjaman dari Bank Dunia melalui Indonesia Water Resources and Irrigation Reform Implementation Program (IWIRIP). Program dilaksanakan melalui perangkat pinjaman adjustable program Loan (APL), untuk APL-II akan dimulai tahun 2013. APL merupakan program jangka panjang yang telah disepakati dan dilaksanakan melalui tahapan proyek, dan masing-masing dinilai secara terpisah. Progress tahapan berikutnya tergantung dari diselesaikannya patokan institusi dan kebijakan yang sudah disetujui untuk setiap tahapan sebelumnya.

Tujuan dilaksanakannya program WISMP adalah untuk mengkonsolidasikan institusi pengelola sector sumberdaya air dan irigasi masyarakat yang telah didesentralisasikan menggunakan Reformasi WATSAL. Kebijakan tersebut dengan memberikan peran yang lebih besar kepada P3A/GP3A dengan prinsip satu system satu pengelolaan dan lebih spesifik pada peran partisipasi P3A dalam pengelolaan irigasi. Program WISMP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerinta pusat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat melalui:

- 1) Peningkatan governance, pengelolaan lembaga, keberlanjutan fiscal, perencanaan dan kinerja sumber daya air dan irigasi;
- 2) Meningkatkan penyatuan system kelembagaan, pembiayaan, kegiatan perencanaan dan kinerja pengelolaan sungai dan irigasi;
- 3) Melaksanakan instrument penunjang sector pertanian untuk meningkatkan produktifitas partanian beririgasi dan
- 4) Intervensi ekonomi dan fisik untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian beririgasi.

Komponen kegiatan WISMP pertanian adalah : Komponen B4 (program pertanian pada lahan beririgasi) dan sedikit kewenangan di B1 (Peningkatan kemampuan pemerintahan dan P3A) dan B2 (Peningkatan kemampuan kapasitas dinas). Sebagai institusi pelaksana adalah Ditjen SDA Kementerian PU, Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Propinsi pelaksana

proyek adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Sulteng, Sulbar dan NTT.

Pedoman untuk kegiatan ini secara detail akan disusun oleh Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.

b. Hibah Korea

Program *Pilot Project on Mechanized rice farming complex* in Indonesia merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea untuk melaksanakan pilot percontohan mekanisasi pertanian untuk komoditas padi di Indonesia. Pilot percontohan ini merupakan hasil dari 1st Join task Force Meeting antara Pemerintah Indonesia dan Korea pada tanggal 18-19 Mei 2011 di Bali.

Pilot percontohan ini direncanakan dilaksanakan mulai Tahun 2013 sampai Desember 2014 di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung proyek tersebut maka perlu dilakukan pendampingan terhadap petugas daerah dan pelaksana di lapangan. Dengan adanya pendampingan ini, petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten mampu mengarahkan petugas teknis untuk memanfaatkan secara optimal alat dan mesin pertanian yang dipunyai sehingga tujuan proyek ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Sehubungan

dengan hal tersebut diatas pada TA. 2014 Direktorat Alsintan Ditjen PSP telah mengalokasikan dana pendampingan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Metode pelaksanaan dari kegiatan ini berupa belanja bahan melalui swakelola dan belanja perjalanan yang dilakukan dalam rangka melakukan penyusunan pedoman, koordinasi, sosialisasi, bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pendampingan meliputi Penyusunan Rencana Kerja, Pedoman Teknis Pendampingan *Pilot Project on Mechanized rice farming complex in Indonesia*. Sosialisasi dan Koordiansi Pelaksanaan Proyek, Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Proyek, Sosialisasi Administrasi Keuangan Proyek, Bimbingan dan Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi, Pertemuan Diseminasi hasil pelaksanaan proyek dan penyusunan laporan.

c. *Sub Project-2 : Capacity Development For Climate Change Adaption Actions in Agriculature and Other Relevant Sectors*

Dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan iklim, dipandang perlu untuk menyusun suatu strategi antisipasi dan program aksi adaptasi yang dapat

menurunkan dampak negatif dari perubahan iklim yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kerugian petani yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dalam kaitan usaha peningkatan kapasitas adaptasi dari petugas, penyuluh dan petani, Kementerian Pertanian telah mengusulkan proyek kepada JICA dengan judul *CAPACITY DEVELOPMENT FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION ACTIONS IN AGRICULTURE AND OTHER RELEVANT SECTORS*.

Proyek bertujuan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, melalui diseminasi informasi perubahan iklim dan cuaca kepada petani, sejalan dengan output proyek SP2 tentang peningkatan jaringan kerapatan observasi agroklimat di daerah sentra produksi pangan dan peningkatan kapasitas adaptasi di sektor pertanian dan sektor lain terhadap perubahan iklim.

Proyek akan dilaksanakan di 4 (empat) propinsi antara lain: Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan); Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto); Jawa Barat (Kabupaten Cirebon); Jawa Tengah (Kabupaten Demak).

Kegiatan proyek Pengembangan Model Prediksi *Downscaling* Dampak Perubahan Iklim untuk Sektor Pertanian di Indonesia ini dilaksanakan oleh Direktorat

Pengelolaan Air Irigasi, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan berkoordinasi dengan Ditjen TPH; Badan Litbang Pertanian; Badan SDM & Penyuluhan Pertanian. Proyek akan dilaksanakan selama 29 Bulan yang pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2015. (Jadwal pelaksanaan proyek terlampir). Pembiayaan untuk proyek ini dibebankan kepada JICA dan Pemerintah Indonesia melalui DIPA Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014

Monitoring adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah/sedang/akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Untuk mengukur kinerja pembangunan PSP diperlukan laporan-laporan sesuai dengan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan.

Secara umum laporan kegiatan ini berupa :

1. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja
2. masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan
3. laporan akan dilakukan secara berkala (bulan, triwulan dan akhir tahun)

4. laporan akhir dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan)

Secara garis besar setiap Satuan Kerja (Satker) harus melaporkan kemajuan kegiatan mengacu pada SK Menteri Pertanian Nomor 431/Kpts/RC.210/7/2004 tentang Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Proyek yang disempurnakan dengan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 391/RC.210/A/6/2005. Pada tahun 2006 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Tujuan dari pelaporan adalah :

- a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dan usaha-usaha pemecahannya.

Adapun ruang lingkup monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan prasarana dan sarana pertanian yaitu:

I. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

A. JENIS LAPORAN

Jenis laporan yang harus dibuat oleh masing-masing Satker adalah sbb:

- a. Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh oleh setiap Satker Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan dikirim paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.
- b. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Laporan manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dibuat oleh setiap satker baik propinsi maupun kabupaten.
Laporan ini diterima di pusat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- c. Laporan Evaluasi Kinerja, yaitu kegiatan selama 1 (satu) tahun dikirim paling lambat 15 hari setelah tahun anggaran berakhir, yang meliputi dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan. Dalam laporan Evaluasi Kinerja agar dilengkapi dengan manfaat kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian menggunakan Form PSP 04

B. INSTRUMEN PELAPORAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.

Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara maksimal dalam waktu yang tepat diperlukan instrument pelaporan memadai yang dapat menampung informasi yang relevan untuk diketahui sehingga dapat memberikan informasi dan petunjuk yang akurat agar dapat dilakukan tindakan koreksi dan merumuskan perencanaan periode berikutnya. Instrumen pelaporan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu :

1. Form PSP
 - a. Dinas Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 1) Form PSP 01 yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (terlampir). Entry data/informasi dilakukan secara on line (Model Pelaporan On-line-MPO) pada website Ditjen PSP. Bagi Satker yang belum mempunyai fasilitas telepon/internet maka entry data dapat dilakukan secara manual ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ditingkat propinsi.
 - 2) Form PSP 03 yaitu laporan manfaat kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan laporan

pelaksanaan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya (terlampir). Manfaat dari kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian terukur baik dari aspek peningkatan produktivitas dan produksi, kesejahteraan petani (antara lain: peningkatan penerimaan maupun pengurangan biaya angkut) maupun penyerapan tenaga kerja.

Contoh.

- Pengembangan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan seluas 500 Ha dengan produktivitas sebesar 5 ton/ha dapat meningkatkan IP sebesar 50% sehingga dapat memberikan manfaat berupa peningkatan produksi sebesar $500 \times 0,5 \times 5 \text{ ton} = 1.250 \text{ ton}$.
- Perluasan lahan cetak sawah seluas seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton per Ha dan IP sebesar 150% dapat memberikan manfaat produksi padi sebanyak $200 \times 1,5 \times 2,5 \text{ ton} = 750 \text{ ton}$

b. Dinas Tingkat Propinsi

- 1) Form PSP 02 yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan rekapan dari laporan Form PSP 01 (terlampir)

2) Form PSP 03 yaitu laporan manfaat kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan laporan pelaksanaan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan Form PSP 03 (terlampir).

2. Pembobotan Fisik.

Untuk mempermudah monitoring tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan perlu dilakukan pembobotan fisik sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Skoring pembobotan fisik terhadap kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ada 2 macam yaitu :

a. Skoring Pembobotan Fisik terhadap Kegiatan PSP dengan Pola Bansos sebagai berikut :

No	TAHAP PELAKSANAAN	BOBOT FISIK (%)
A	PERSIAPAN	20
1	SK Team Teknis	2
2	Penetapan CPCL	3
3	Design	4
4	RUKK	4
5	Perjanjian Kerjasama & Pembukaan Rekening	4
6	Transfer Dana	3

No	TAHAP PELAKSANAAN	BOBOT FISIK (%)
B	PELAKSANAAN	80
1	Konstruksi *)	80
TOTAL		100

Keterangan :

*) Pembobotan Fisik dilakukan berdasarkan pembobotan pada masing-masing pedoman teknis lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

- b. Skoring Pembobotan Fisik terhadap Kegiatan PSP dengan Pola Kontraktual sebagai berikut :

No	TAHAP PELAKSANAAN	BOBOT FISIK (%)
A	PERSIAPAN	20
1	SK Panitia	4
2	RKS	4
3	HPS	4
4	Penetapan Pemenang	4
5	Penandatanganan Kontrak	4
B	PELAKSANAAN	80
1	Konstruksi *)	80
TOTAL		100

Keterangan :

*) Pembobotan Fisik akan dilakukan berdasarkan prestasi kerja kontraktor.

Contoh:

Prosentase kemajuan fisik di lapangan mencapai 50%, artinya Bobot Fisik = $50\% \times 80 = 40\%$, dst.

3. Jadwal Palang

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan sedini mungkin dengan membuat jadwal palang untuk mengetahui setiap waktu pelaksanaan. Jadwal palang ini sangat diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Jadwal palang ini harus dibuat untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam POK baik untuk kegiatan di propinsi (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) maupun untuk kegiatan di kabupaten/kota (Dana Tugas Perbantuan) seperti terlampir.

C. MEKANISME PELAPORAN

1. Dinas Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Laporan realisasi fisik dan keuangan (Form PSP 01) serta laporan manfaat (Form PSP 03) dibuat oleh **Kasubdin/Kabid** pada **Petugas Teknis Dinas Tingkat Kabupaten/Kota** yang menangani kegiatan PSP.
- b. Laporan pada butir a. diatas dikirim ke Dinas lingkup Pertanian Propinsi paling lambat **tanggal 5 setiap bulannya** dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Dinas Tingkat Propinsi
 - a. Laporan realisasi fisik dan keuangan (Form PSP 02) serta laporan manfaat (Form PSP 04) dibuat oleh **KaSubdin/ Kabid Tingkat Propinsi** yang menangani kegiatan PSP.
 - b. Laporan pada butir a. diatas dikirim ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian paling lambat **tanggal 10 setiap bulannya.**

Alur pelaporan mulai dari Dinas Tingkat Kabupaten/Kota, Dinas Tingkat Propinsi dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian seperti terlampir.

3. Pengiriman Laporan

Pengiriman laporan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilakukan dengan cara :

 - a. Model Pelaporan On-line (MPO)

MPO merupakan cara pengiriman data dan informasi melalui sarana website (internet). Petugas satker dapat mengirimkan laporan perkembangan realisasi kegiatan (Form PSP 01) dengan cara meng-update melalui website Ditjen PSP dengan alamat

<http://psp.deptan.go.id> (klik SISPSP) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Dinas Tingkat Kabupaten/Kota yang mengupdate data ini tiap bulan, dapat diakses oleh Propinsi dan Pusat sebagai laporan bulanan.

- b. Pengiriman laporan Form PSP 02, 03 dan 04 dan Form PSP 01 bagi daerah belum tersedia fasilitas telepon/internet, dapat ditujukan kepada **Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian** dengan alamat sebagai berikut :

**Kantor Pusat Kementerian Pertanian,
Gedung D Lantai 8 Jalan Harsono RM No. 3
Ragunan, Jakarta Selatan - 12550 Faximile
021-7816083 atau 021-7816086**

- c. Khusus untuk laporan Simonev petugas satker dapat mengentri laporan realisasi pelaksanaan kegiatan PSP melalui E-mail: **monevpsp@gmail.com**

4. Kualitas Laporan

- a. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju "Good Governance" adalah penyampaian laporan tepat waktu dan akurat disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku.

- b. Laporan harus baik, benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Kualitas laporan akan dijadikan salah satu indikator *reward dan punishment* bagi setiap satker.

Laporan Fisik harus dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan 0% ; 50% dan 100% yang diambil dari titik tetap/titik yang sama

II. Pelaporan Keuangan (SAI)

Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan keuangan/SAI terdiri dari SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). Ketentuan pelaporan keuangan/SAI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- A. Pelaporan Keuangan/SAI Dana Dekonsentrasi
1. Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi, Pemerintah Propinsi sebagai UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi
 2. Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah kepala SKPD yang menerima dana dekonsentrasi, sedangkan penanggung jawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Gubernur
 3. Selanjutnya, pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dan APBD
 4. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi kepada Kementerian Negara / Lembaga melalui Gubernur
 5. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa laporan keuangan dan laporan BMN
- B. Pelaporan Keuangan/SAI Dana Tugas Pembantuan
1. Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana tugas pembantuan, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan
 2. Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan adalah kepala SKPD yang menerima dana Tugas Pembantuan, sedangkan penanggung jawab UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan

adalah Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota)

3. Selanjutnya, pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari pelaporan keuangan/barang dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan APBD
4. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Kementerian Negara / Lembaga melalui Kepala Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa Laporan Keuangan dan Laporan BMN.

C. Pengiriman Laporan

Laporan yang berupa laporan keuangan dan laporan BMN setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN untuk laporan keuangan dan KPKNL untuk laporan BMN, selanjutnya dikirim ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W) dan UAPPA-E1. Laporan ke UAPPA-E1 ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Peratnian dengan alamat sebagai berikut :

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D lantai 8, Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
Telp : 021-7828428 Facximili : 021-7816083, 021-7816086 atau melalui E-mail : sai_pla@yahoo.com.

VII. REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014

Setelah DIPA dan POK dana Tugas Pembantuan (TP) TA. 2014 diterima oleh Satker lingkup Pertanian di Kabupaten/Kota, agar segera diperiksa dan dipelajari. Apabila terdapat kesalahan kodifikasi, kesalahan nama satker dan atau diperlukan penyesuaian jenis kegiatan pada DIPA atau POK dengan kebutuhan di lapangan agar segera diusulkan revisi DIPA dan POK tersebut.

Perubahan yang termasuk dalam kategori revisi DIPA antara lain: perubahan nama satker, perubahan kode KPPN, perubahan alokasi anggaran per kegiatan, perubahan alokasi anggaran per output (sub kegiatan), perubahan alokasi anggaran per jenis belanja, perubahan register, dll. Revisi DIPA agar diproses di Kanwil Perbendaharaan setempat. Sedangkan perubahan yang termasuk dalam kategori revisi POK antara lain: perubahan uraian/detil dan satuan biaya per item pengeluaran yang **tidak menyebabkan** perubahan alokasi anggaran per kegiatan, per output (sub kegiatan), dan per jenis belanja.

Adapun prosedur revisi DIPA dan POK dana Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PSP adalah sebagai berikut:

a. Revisi DIPA

1. Jika usulan revisi merubah substansi kegiatan maka harus mendapat persetujuan dari Ditjen PSP terlebih dahulu. Surat permohonan persetujuan diusulkan oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Propinsi selaku satker pemegang DIPA kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendapatkan persetujuan. Usulan revisi DIPA harus dilengkapi dengan alasan revisi DIPA, Term of Reference (TOR) dan data dukung seperti Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dan data terkait lainnya (SID, CP/CL, SK Struktur Organisasi di Tingkat Kabupaten/ Kota dll) yang telah dilegalisir.
2. Usulan tersebut, jika disetujui oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian agar diproses lebih lanjut ke Kanwil Perbendaharaan setempat. Apabila Revisi DIPA tersebut ditolak oleh Ditjen PSP maka akan dijawab melalui surat penolakan revisi DIPA.
3. Persetujuan atau penolakan revisi DIPA selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Propinsi yang mengusulkan.
4. Revisi yang telah disetujui diproses lebih lanjut di Kanwil Perbendaharaan setempat.

Usulan revisi DIPA yang telah selesai diproses oleh Kanwil Perbendaharaan setempat, selanjutnya copy surat hasil revisinya/ tembusannya disampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

5. Revisi DIPA yang telah disetujui oleh Ditjen Perbendaharaan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan perbaikan POK.

b. Revisi POK

1. Diusulkan oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Usulan revisi POK harus dilengkapi dengan alasan revisi POK, *Term of Reference* (TOR), data dukung seperti Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dan data terkait lainnya (SID, CP/CL dll) yang telah dilegalisir.
2. Usulan revisi POK beserta TOR dan RAB selanjutnya akan ditelaah di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Jika disetujui akan diterbitkan persetujuan Revisi POKnya. Apabila Revisi POK ditolak oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian maka akan dijawab melalui surat penolakan revisi POK.
3. Persetujuan atau penolakan revisi POK selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi yang mengusulkan.

**VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2014**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerja Prasarana dan Sarana Pertanian diindikasikan oleh beberapa indikator, antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Pertanian di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Tersedianya rumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Terlaksananya bimbingan penyusunan Basis Data Pertanian
4. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan dan peningkatan infrastruktur pertanian (optimalisasi) pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan pendayagunaan lahan pertanian terlantar.
6. Terwujudnya infrastruktur pertanian melalui jalan produksi dan jalan usaha tani mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
7. Terwujudnya upaya reklamasi lahan-lahan pertanian yang secara inherent dikategorikan marginal.

8. Terwujudnya upaya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian melalui pengembangan usahatani konservasi dan pengembangan demplot-demplot konservasi.
9. Terkendalinya laju alih fungsi lahan, melalui perlindungan kawasan pertanian produktif yang ditetapkan, sehingga meningkatnya jumlah persil lahan petani yang bersertifikat.
10. Terwujudnya lahan pertanian baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
11. Terwujudnya pertambahan luas baku kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
12. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru.
13. Tersedianya Peta Luas Lahan Baku Sawah
14. Tersedianya lahan HMT dalam upaya mendukung peningkatan produksi peternakan.
15. Tercapainya pengembangan sumber air irigasi
16. Tercapainya rehabilitasi dan optimasi pemanfaatan air irigasi
17. Terwujudnya konservasi air dan terbangunnya kesadaran masyarakat pertanian terhadap dampak perubahan iklim
18. Terkendalinya dampak kekeringan dan banjir
19. Terwujudnya kelembagaan petani pemakai air yang handal dan mandiri

20. Terwujudnya upaya optimalisasi pengembangan alat dan mesin pertanian
21. Terwujudnya kelembagaan UPJA mandiri
22. Terwujudnya pengawasan, penggunaan dan peredaran alat dan mesin pertanian yang efektif
23. Tercapainya pengembangan alat dan mesin pertanian
24. Meningkatnya kualitas koordinasi kelembagaan dalam menangani masalah prasarana dan sarana pertanian.
25. Meningkatnya kualitas SDM pertanian dalam menangani Prasarana dan Sarana Pertanian.
26. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
27. Terwujudnya pengembangan usaha agribisnis perdesaan.
28. Terwujudnya fasilitasi pembiayaan pertanian.
29. Terwujudnya fasilitasi penyediaan pupuk dan pestisida.

Indikator keberhasilan untuk masing-masing aspek dalam rangka pengelolaan lahan secara rinci sebagaimana terdapat pada lampiran.

IX. PENUTUP

Dalam melaksanakan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014 baik Kegiatan APBN maupun Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan pemahaman para pelaksana terhadap kegiatan pokok dan komponen-komponen kegiatan prasarana dan sarana pertanian.

Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian disusun sebagai acuan dalam melaksanakan/kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dari aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian serta pembiayaan pertanian.

Melalui pemahaman kegiatan dan komponen-komponen kegiatan tersebut diharapkan para pelaksana akan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan prasarana dan sarana pertanian dengan benar dalam rangka mendukung Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan yang berbasis komoditas. Selain Pedoman Umum ini juga disusun Pedoman Teknis (daftar terlampir) yang dapat dijadikan dasar penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di

tingkat propinsi dan Petunjuk Teknis di tingkat Kabupaten/Kota.

Selanjutnya sejalan dengan Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka diharapkan kerjasama terpadu antar unit-unit kerja terkait mulai dari tingkat Pusat, Propinsi sampai ke tingkat Kabupaten / Kota baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan partisipasi petani secara aktif diharapkan dapat tercipta suatu sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pengembangan sistem usaha tani berkelanjutan yang didukung oleh prasarana dan sarana pertanian yang mantap.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR PEDOMAN UMUM DAN PEDOMAN TEKNIS
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

1. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014;
2. Pedoman Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan lingkup Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014;
3. Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014;

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan :

1. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2014;
2. Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2014;
3. Pedoman Teknis Perluasan Lahan Hortikultura;
4. Pedoman Teknis Perluasan Lahan Perkebunan;
5. Pedoman Teknis Perluasan Lahan Peternakan (Kebun Hijauan Makanan Ternak dan Padang Penggembalaan);
6. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2014;
7. Pedoman Teknis Pengembangan System Of Rice Intensification TA. 2014;
8. Pedoman Teknis Kegiatan Pra Sertifikasi Tanah Petani TA. 2014;

9. Pedoman Teknis Kegiatan Pra/Pasca Sertifikasi Tanah Petani TA. 2014;

Direktorat Pengelolaan Air Irigasi:

1. Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi;
2. Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air ;
3. Pedoman Teknis Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim ;
4. Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelembagaan ;
5. Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi Perpipaan ;
6. Pedoman Teknis Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Lahan Sawah.

Direktorat Pupuk dan Pestisida:

1. Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDKK
2. Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pupuk
3. Pedoman Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KPPP) dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida
4. Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2014;

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian:

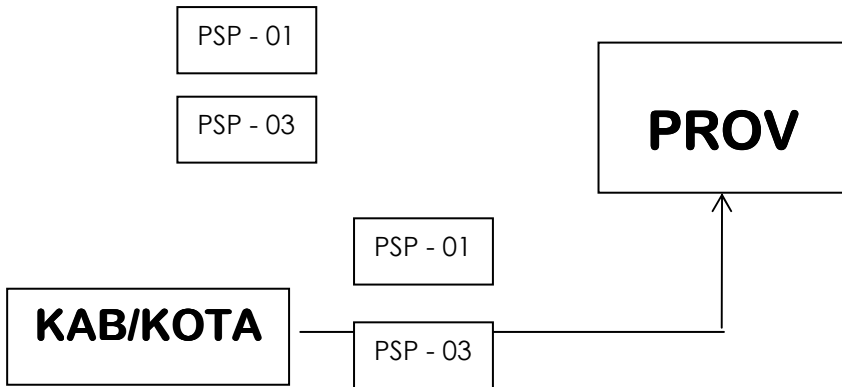
1. Pedoman Teknis Bantuan Alsintan
2. Pedoman Teknis Pengembangan dan Pembinaan UPJA

Direktorat Pembiayaan Pertanian:

1. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
2. Pedoman Teknis KKP-E
3. Pedoman Teknis KUR Sektor Pertanian
4. Pedoman Penumbuhan LKM-A Gapoktan/PUAP
5. Pedoman Umum Asuransi Pertanian
6. Pedoman Umum PKBL BUMN

Matrik Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan PSP Tahun 2014

No	Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pedoman Teknis diterima di Propinsi	█												
2	Juklak di terima di Kabupaten/Kota	█												
3	POK diterima Kabupaten/Kota	█												
4	Juknis oleh Kabupaten/Kota	█												
5	Sosialisasi Ke Propinsi dan Kab/Kota	█												
6	Revisi POK dan DIPA	█	█	█	█									
7	SK KPA dari Gubernur, Bupati/Walikota	█												
8	SK PPK dari KPA	█												
9	SK Panitia Pengadaan dari KPA	█												
10	CP/CL	█	█											
11	SID	█	█											
12	Tanda Tangan Kontrak	█	█											
13	Pelaksanaan Konstruksi			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█



**MATRIKS KETERKAITAN KELEMBAGAAN
DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No	Kebijakan	Instansi													
		Deptan	Menko Ekuin	Sekneg	Bappenas	Depdagri/ Pemda	Dep. PU	Dep. Keu	Dep. Hut	Depnakertrans	BMG	Bakosurtanal	BPN	KLH	Ormas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN														
	- Pengembangan infrastruktur dilakukan melalui pembangunan/ rehabilitasi JUT pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura dan jalan produksi pada kawasan perkebunan dan peternakan	√	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√
	- Perluasan areal pertanian	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-
	- Penyusunan bahan legislasi dan regulasi aspek lahan	√	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√
	- Kebijakan perlindungan kawasan pertanian produktif	√	√	-	√	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√
	- Peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi untuk mencegah terjadinya laju alih fungsi lahan	√	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√
	- Koordinasi dengan instansi terkait	√	√	√	√	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√
	- Partisipasi dan pemberdayaan petani	√	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-	-	√	√

No	Kebijakan	Instansi													
		Deptan	Menko Ekuin	Sekneg	Bappenas	Depdagri/Pemda	Dep. PU	Dep. Keu	Dep. Hut	Depnakertrans	BMG	Bakosurtanal	BPN	KLH	Ormas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat petani dalam pengembangan optimasi lahan terlarang	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat petani dalam melaksanakan usahatani konservasi dan rehabilitasi pada lahan potensial kritis, semi kritis dan kritis	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√
	- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat petani dalam melakukan reklamasi lahan pada rawa, bekas tambang dan industri	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√
	- Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan dalam melaksanakan usahatani ramah lingkungan	√	-	-	√	√	√	√	-	-	√	√	-	√	√

Keterangan :

- BMG : Badan Meteorologi Geofisika
- BPN : Badan Pertanahan Nasional
- KLH : Kementerian Lingkungan Hidup
- Bakosurtanal : Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
- Ormas : Organisasi Masa

**MATRIKS KETERKAITAN KELEMBAGAAN
DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No.	Kebijakan	Instansi												
		Deptan	Menko Ekuin	Sekneg	Bappenas	Depdagri/Pemda	Dep. PU	Dep. Keu	Dep. Hut	BMG	LAPAN	Dep Pertambangan	KLH	Ormas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PENGELOLAAN AIR IRIGASI													
	- Pengembangan sumber air alternatif skala kecil untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	√	√	-	√	√	√	√	-	-	√	√	-	-
	- Optimasi pemanfaatan air irigasi untuk tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
	- Konservasi air untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-
	- Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola air untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- BMG : Badan Meteorologi dan Geofisika.
- BPN : Badan Pertanahan Nasional.
- KLH : Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bakosurtanal : Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
- Ormas : Organisasi Masa.

**MATRIK KETERKAITAN KELEMBAGAAN
DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No.	Kebijakan	Instansi										
		Kementerian Pertanian	Menko Ekuin	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perindustrian	Kementerian Keuangan	Pemda/ Dinas Prop/Kab	Perguruan Tinggi	Komisi Pestisida	Komisi Pupuk	Kepolisian	Asosiasi/ Lembaga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PUPUK DAN PESTISIDA Penyempurnaan kebijakan dan peraturan dibidang pupuk dan pestisida	√										
	Peningkatan pengawalan ketersediaan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi serta bantuan langsung pupuk (BLP) melalui penyempurnaan data RDKK petani penerima pupuk bersubsidi dan CPCL penerima BLP	√	√				√	√	√	√	√	√
	Pengembangan pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk	√					√					
	Pengawalan penyaluran dan penggunaan pestisida yang aman bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan	√		√	√		√	√	√		√	√
	Pemberdayaan kelembagaan pengawasan pupuk dan pestisida	√		√	√		√	√	√	√	√	√
	Evaluasi peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida	√		√	√		√	√	√	√	√	√
	Perbaikan kualitas lahan melalui pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah	√					√	√		√		√
	Peningkatan pelayanan teknis pendaftaran pupuk dan pestisida				√			√	√	√		√

**MATRIK KETERKAITAN KELEMBAGAAN
DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No	Kebijakan	Instansi											
		Deptan	Menko Ekuin	Setneg	Bappenas	Depdagri / Pemd	Dep. PU	Dep. Perindustrian	Menristek / BPPT	BMG	BSNI	KLH	Ormas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ALAT DAN MESIN PERTANIAN - Pengembangan Standarisasi Alat dan Mesin Pertanian untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. - Optimasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian untuk mendukung Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan - Pengawasan Pengadaan, Penggunaan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. - Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) untuk mendukung Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan - Pengembangan Pelayanan Alsintan (Bengkel dan Pengrajin)	√	√		√	√		√	√		√		√
		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
		√	√		√	√		√	√		√		√
		√	√		√	√		√	√	√	√		√
		√	√			√		√			√		√

**MATRIK KETERKAITAN KELEMBAGAAN
DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No.	Kebijakan	Instansi																
		Deptan	Menko Ekuin	Menko Kesra	Sekneg	Bappenas	Depdagri/ Pemda	Dep. PU	Dep. Keu	Dep. Hut	Depnaker trans	Kementrian Kop.UKM	Perbankan / Non Perbankan	BMG	Bakor surtanal	BPN	KLH	Ormas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
	PEMBIAYAAN PERTANIAN																	
	- Pengembangan Skim Kredit Program (KKP-E, KUR, KUPS dan KPEN-RP)	✓	✓			✓	✓		✓		✓		✓					
	- Penyaluran dana BLM PUAP	✓		✓		✓	✓		✓			✓						✓
	- Fasilitasi Pengembangan LKMA	✓		✓		✓	✓		✓			✓						✓
	- Pengembangan pola pembiayaan syariah	✓				✓	✓		✓			✓						✓
	- Perlindungan usaha pertanian	✓				✓	✓		✓			✓						✓
	- Fasilitasi pemanfaatan dana PKBL BUMN	✓				✓	✓		✓			✓						✓

Keterangan :

- BMG : Badan Meteorologi dan geofisika
- BPN : Badan Pertanahan Nasional
- KLH : Kementerian Lingkungan Hidup
- Bakorsurtanal : Badan Koordinas Survey dan Pemetaan Nasional
- Ormas : Organisasi Masal

**INDIKATOR KEBERHASILAN
PELAKSANAAN KEGIATAN**

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DALAM MENDUKUNG TANAMAN PANGAN, HORTILUKTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

NO.	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten/ Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	Optimasi Lahan					
		1 Pengembangan Optimasi Lahan	1. Tersedianya Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan 2. Tersosialisasinya Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan 3. Terpahaminya Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan oleh Petugas Daerah 4. Termonitornya perkembangan kegiatan dan tersedianya data hasil evaluasi sebagai acuan kegiatan berikutnya	1 Pembinaan Pengembangan Optimasi Lahan	1. Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Optimasi Lahan 2. Tersosialisasinya Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Optimasi Lahan 3. Terpahaminya Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Optimasi Lahan oleh Petugas Daerah 4. Termonitornya perkembangan kegiatan dan tersedianya data hasil evaluasi sebagai acuan kegiatan berikutnya	1 Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan	1. Tersedianya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Optimasi Lahan 2. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan dan infrastruktur dan pendayagunaan lahan

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DALAM MENDUKUNG TANAMAN PANGAN, HORTILUKTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

NO.	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten/ Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
		2. Pengembangan <i>System of Rice Intensification</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pedoman Teknis <i>System of Rice Intensification</i> (SRI) 2. Tersosialisasinya Pedoman Teknis <i>System of Rice Intensification</i> (SRI) 3. Terpahaminya Pedoman Teknis <i>System of Rice Intensification</i> (SRI) oleh Petugas Daerah 4. Termonitornya perkembangan kegiatan dan tersedianya data hasil evaluasi sebagai acuan kegiatan berikutnya 	1. Pembinaan Pengembangan <i>System of Rice Intensification</i> (SRI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan <i>System of Rice Intensification</i> (SRI) 2. Tersosialisasinya Pedoman Pelaksanaan Pengembangan <i>System of Rice Intensification</i> (SRI) 3. Terpahaminya Pedoman Pelaksanaan Pengembangan <i>System of Rice Intensification</i> (SRI) oleh Petugas Daerah 4. Termonitornya perkembangan kegiatan dan tersedianya data hasil evaluasi sebagai acuan kegiatan berikutnya 	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan <i>System of Rice Intensification</i> (SRI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan <i>System of Rice Intensification</i> (SRI) 2. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan dan pendayagunaan lahan melalui pengembangan <i>System of Rice</i>
		Pengendalian Lahan					
		1. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian (tanaman pangan)	1. Terwujudnya perumusan kebijakan Departemen Pertanian di bidang pengendalian lahan tanaman pangan	1. Pembinaan pengembangan-pengendalian lahan	1. Tersedianya bahan perencanaan dan kebijakan lebih lanjut	1. Pengembangan	1. Tersedianya lahan tanaman pangan bersertipikat

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DALAM MENDUKUNG TANAMAN PANGAN, HORTILUKTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

NO.	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten/ Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
			<p>2. Tersedianya rumusan, standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengendalian lahan tanaman pangan</p> <p>3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pengendalian lahan tanaman pangan</p> <p>4. Tersedianya data pengendalian lahan tanaman pangan yang optimal</p> <p>5. Tersedianya standardisasi dan mutu pengendalian lahan tanaman pangan yang baik</p> <p>6. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>7. Tercapainya konsolidasi usahatani tanaman pangan melalui corporate farming</p>		<p>2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam pemberdayaan pengendalian lahan</p> <p>3. Terwujudnya kesepakatan dalam menentukan kebijakan, prioritas serta keteraturan pelaksanaannya</p>		<p>2. Tersedianya petunjuk pelaksanaan teknis peningkatan hak atas tanah petani</p>
		Penyusunan Pedoman Perluasan Areal Kawasan Tanaman Pangan	Tersedianya pedoman teknis perluasan areal kawasan Tanaman Pangan	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Areal Kawasan Tanaman Pangan	Tersedianya petunjuk pelaksanaan perluasan areal kawasan Tanaman Pangan	Penyusunan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Kawasan Tanaman Pangan	Tersedianya petunjuk teknis perluasan areal kawasan Tanaman Pangan

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DALAM Mendukung TANAMAN PANGAN, HORTILUKTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

NO.	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten/ Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
		Identifikasi Potensi Perluasan Areal Tanaman Pangan	Tersedianya data potensial lahan pencetakan sawah baru di seluruh propinsi yang memenuhi persyaratan (standar, kriteria, norma) yang telah ditentukan	Identifikasi potensi perluasan areal tanaman pangan	Terinventarisir dan teridentifikasinya data calon lokasi pencetakan sawah pada Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten	Identifikasi dan penetapan lokasi pencetakan sawah	Tersedianya data dan informasi calon lokasi yang layak untuk pencetakan sawah pada Areal Tanaman Pangan
		Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan Areal Perkebunan	Meningkatnya pengetahuan petugas teknis propinsi di bidang perluasan areal Tanaman Pangan	Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan	Meningkatnya pengetahuan petugas teknis Kabupaten/ Kota di bidang perluasan areal Tanaman Pangan	Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan	Tersedianya petugas lapangan di bidang perluasan areal Tanaman Pangan yang terampil
		Bimbingan dan Pembinaan Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan	Berkembangnya perluasan areal tanaman pangan di daerah yang sesuai dengan tata ruang wilayah Terwujudnya perluasan areal tanaman pangan di daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	Bimbingan dan pembinaan teknis pencetakan sawah	Berkembangnya perluasan areal tanaman pangan di daerah yang sesuai dengan tata ruang wilayah Terwujudnya perluasan areal tanaman pangan di daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	Bimbingan dan pembinaan pemantapan lahan sawah baru	Terlaksananya pelaksanaan perluasan areal tanaman pangan
		Penyusunan Konsep Perangkat Peraturan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Tersedianya perangkat peraturan yang mendukung kelancaran pencetakan sawah Perluasan areal tanaman pangan berjalan terarah dan tidak menimbulkan dampak negatif dari segi sosial ekonomi dan lingkungan	Penyusunan Konsep Peraturan Daerah tentang Perluasan Areal Tanaman Pangan	Terarahnya pelaksanaan Perluasan areal tanaman pangan di daerah	Penyusunan Konsep Peraturan Daerah tentang Perluasan Areal Tanaman Pangan	Terlaksananya perluasan areal secara berkelanjutan
		Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal Tanaman Pangan	Teratasinya secara dini segala permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan areal tanaman pangan Terealisasinya pelaksanaan kegiatan perluasan areal tanaman pangan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang tertuang dalam pedoman	Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal Tanaman Pangan	Teratasinya secara dini segala permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan areal tanaman pangan Terealisasinya pelaksanaan kegiatan perluasan areal tanaman pangan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang tertuang dalam pedoman	Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal Tanaman Pangan	Termonitor dan terlaksananya perluasan areal Tanaman Pangan sesuai dengan pedoman

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PENGELOLAAN AIR IRIGASI
DALAM Mendukung TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TA.2014**

No	Aspek	PUSAT		Propinsi		Kabupaten / Kota		
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	
1	Pengelolaan Air	a	Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Tersusunnya Pedoman Teknis Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Bimbingan dan monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Rehabilitasi / Pembuatan Prasarana Irigasi Partisipatif	- Terehabilitasinya / terbangunnya Prasarana Irigasi Partisipatif
		b	Penyusunan Pedoman Teknis Kelembagaan Petani Pemakai Air	- Tersusunnya Pedoman Teknis Kelembagaan petani pemakai air	- Bimbingan dan monitoring kelembagaan petani pemakai air	- Terlaksananya kegiatan kelembagaan petani pemakai air	- Pelaksanaan Kelembagaan Petani Pemakai Air	- Terlaksananya Kelembagaan Petani Pemakai Air
		c	Sosialisasi Pedoman Teknis	- Tersosialisasinya Pedoman Teknis	- Sosialisasi Pedoman Teknis	- Tersosialisasinya Pedoman Teknis	- Sosialisasi Pedoman Teknis	- Tersosialisasinya Pedoman Teknis
		d	Bimbingan dan evaluasi kelembagaan petani pemakai air	- Terlaksananya kegiatan kelembagaan petani pemakai air	- Bimbingan dan evaluasi kelembagaan petani pemakai air	- Terlaksananya kegiatan kelembagaan petani pemakai air	- Pelaksanaan Bimbingan dan evaluasi kelembagaan petani pemakai air	- Terlaksananya kegiatan kelembagaan petani pemakai air
		e	Bimbingan Pelaksanaan Irigasi Partisipatif	- Terlaksananya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas daerah dalam pelaksanaan Irigasi	- Bimbingan Pelaksanaan Pola Irigasi Partisipatif	- Terlaksananya kegiatan Pola Irigasi Partisipatif	- Pelaksanaan rehabilitasi/pembuatan Prasarana Irigasi Partisipatif	- Terlaksananya rehabilitasi/pembuatan Prasarana Irigasi Partisipatif
		f	Inventarisasi lokasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Tersusunnya informasi lokasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Rekapitulasi lokasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Tersedianya informasi lokasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Data lokasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Tersedianya data lokasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif
		g	Lomba P3A dan GP3A/IP3A tingkat Nasional	- Terselenggaranya Lomba P3A dan GP3A/IP3A tingkat Nasional	- Mengusulkan peserta lomba P3A/GP3A tingkat Nasional	- Terwakilinya peserta lomba P3A tingkat Nasional	- Menyeleksi peserta lomba P3A dan GP3A/IP3A tingkat Nasional	- Terpilihnya peserta lomba P3A/GP3A tingkat Nasional
		h	Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Tersedianya informasi permasalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Termonitoring dan terevaluasinya permasalahan kegiatan Irigasi Partisipatif
		i	Monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan petani pemakai air	- Tersedianya informasi permasalahan pelaksanaan kegiatan kelembagaan petani pemakai air	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan petani pemakai air	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan petani pemakai air	- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan petani pemakai air	- Termonitoring dan terevaluasinya permasalahan kegiatan kelembagaan petani pemakai air
		j	Penyusunan profil perkembangan kelembagaan P3A di Pulau Jawa	- Tersusunnya informasi profil kelembagaan P3A di Pulau Jawa	- Rekapitulasi profil kegiatan kelembagaan P3A di Pulau Jawa	- Tersedianya informasi profil kegiatan kelembagaan P3A di Pulau Jawa	- Data profil kegiatan kelembagaan P3A di Pulau Jawa	- Tersedianya profil kegiatan kelembagaan P3A di Pulau Jawa

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PUPUK DAN PESTISIDA
DALAM MENDUKUNG TANAMAN PANGAN, HORTIKUTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

No	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten / Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Pengawasan Pupuk	Terlaksananya dan termonitornya pengawasan di bidang pupuk guna menekan tingkat penyimpangan pupuk	Pengawasan Pupuk	Termonitornya pengawasan terkait dengan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk guna menekan tingkat	Pengawasan Pupuk	Terlaksananya pengadaan peredaran dan penggunaan pupuk guna menekan tingkat penyimpangan pupuk
		Apresiasi Petugas Pengawas Pupuk dan pestisida	Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan petugas pengawas pupuk dan				
		Koordiansi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Terkoordinasinya dan terciptanya persamaan persepsi dan hubungan sinergis antara petugas pusat dengan daerah	Koordiansi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Terkoordinasinya dan terciptanya persamaan persepsi dan hubungan sinergis antara petugas pusat dengan	Koordiansi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Terkoordinasinya dan terciptanya persamaan persepsi dan hubungan sinergis antara petugas pusat dengan daerah
		Pengawasan Pestisida	Terlaksananya dan termonitornya pengawasan di bidang pestisida guna menekan tingkat penyimpangan pestisida	Pengawasan Pestisida	Terlaksananya dan termonitornya pengawasan di bidang pestisida guna menekan tingkat penyimpangan pestisida	Pengawasan Pestisida	Terlaksananya dan termonitornya pengawasan di bidang pestisida guna menekan tingkat penyimpangan pestisida
2	Pupuk Anorganik	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Terkawalnya Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
		Monitoring Penggunaan RDKK	Termonitornya penggunaan RDKK	Monitoring Penggunaan RDKK	Monitoring Penggunaan RDKK	Monitoring Penggunaan RDKK	Monitoring Penggunaan RDKK
		Penyusunan Kebijakan Pupuk	Tersusunnya dan tersosialisasinya Permentan tentang pupuk	Penyusunan Kebijakan Pupuk	tersosialisasinya Permentan tentang pupuk	Penyusunan Kebijakan Pupuk	tersosialisasinya Permentan tentang pupuk
		Evaluasi Teknis Pendaftaran Pupuk dan Organik	Terselenggaranya pelayanan teknis pendaftaran pupuk organik				
		Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk	Teratasinya permasalahan dan terealisasinya kebutuhan pupuk bersubsidi	Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk	Tersusunnya rencana kebutuhan pupuk bersubsidi	Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk	Tersusunnya rencana kebutuhan pupuk bersubsidi
3	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Evaluasi Teknis Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah	Terselenggaranya pelayanan teknis pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah (tersedianya rekomendasi teknis hasil uji mutu dan efektivitas pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah)				
		Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Terlaksananya pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)				
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Termonitornya dan terevaluasinya pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah Terwujudnya pemecahan masalah dalam pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Termonitornya dan terevaluasinya pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah Terwujudnya pemecahan masalah dalam pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Termonitornya dan terevaluasinya pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah Terwujudnya pemecahan masalah dalam pengembangan pupuk organik dan pembenah tanah

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PUPUK DAN PESTISIDA
DALAM Mendukung TANAMAN PANGAN, HORTIKUTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

No	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten / Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
3	Pestisida	Evaluasi Pendaftaran Pestisida	Tersusunnya bahan evaluasi pendaftaran pestisida				
		Rapat Pleno Komisi Pestisida	Tersusunnya bahan rapat pleno pestisida				
		Penyaluran Konsep SK Mentan tentang pendaftaran dan izin Pestisida	Tersusunnya SK Mentan tentang Pendaftaran dan izin Pestisida				
		Koordinasi Lembaga Uji Mutu, Uji Efikasi dan Uji Toksisitas Pestisida	Tercapainya kesepakatan dalam menyusun metode standar uji mutu, uji efikasi dan uji toksisitas pestisida				
		Koordinasi kajian pestisida Tedaftar dan Beredar	Terlaksananya rapat koordinasi kajian pestisida terdaftar dan beredar				
		Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan Pestisida	Teratasinya secara dini segala permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan pestisida	Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan Pestisida	Teratasinya secara dini segala permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan pestisida	Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan Pestisida	Teratasinya secara dini segala permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan pestisida

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DALAM Mendukung TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

No	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten / Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	Alat dan Mesin Pertanian	Penyusunan Pedoman Teknis bantuan Traktor R2, R4 dan pompa air					
		Pengawalan kegiatan (bimtek) bantuan alsintan					
		Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan					
		Penyusunan RSNi Alsintan	Tersusunnya konsep RSNi Alsintan				
		Sosialisasi RSNi Alsintan	Tersosialisasinya konsep RSNi Alsintan				
		Penyusunan Pedoman Teknis, SOP dan database Alsintan	Tersedianya Pedoman Teknis, SOP dan database Alsintan				
		Bimbingan Teknis Pengawasan Alsintan	Terlaksananya bimbingan teknis petugas pengawas alsintan	Koordinasi Pengawasan alsintan	Pengawasan alsintan yang efektif	Pengawasan alsintan	Tersedianya data alsintan yang diawasi
Pembinaan pengawasan pengadaan, peredaran	Tersedianya laporan hasil pembinaan pengawasan alsintan						

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DALAM Mendukung TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

No	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten / Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
		Penyusunan Pedoman Teknis pengembangan UPJA mandiri	Tersedianya Pedoman Teknis pengembangan UPJA Mandiri	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pengembangan UPJA Mandiri	Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan pengembangan UPJA Mandiri	Penyusunan Petunjuk Teknis pengembangan UPJA Mandiri	Tersedianya Petunjuk Teknis pengembangan UPJA Mandiri
		Pendampingan Pengembangan UPJA Mandiri	Terbinanya petugas pelaksanaan pengembangan UPJA	Bimbingan dan monitoring pengembangan UPJA	Terlaksananya pengembangan UPJA	Penguatan UPJA	Peningkatan pengelolaan UPJA
		Sosialisasi Pedoman Teknis dan kebijakan pengembangan UPJA Mandiri	Tersosialisasikannya kebijakan pengembangan kelembagaan dan pelayanan UPJA				
		Inventarisasi/update data UPJA	Terupdatenya data UPJA pemula, berkembang dan profesional	Inventarisasi data UPJA	Tersedianya data UPJA baik dari aspek organisasi, teknis dan bisnis	Inventarisasi data UPJA	Tersusunnya data UPJA baik dari aspek organisasi, teknis dan bisnis
		Monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan alsintan	Termonitornya pengembangan kelembagaan alsintan dan tersedianya data informasi permasalahan dan peluang pengembangan	Inventarisasi data UPJA	Tersedianya data UPJA baik dari aspek Organisasi, Teknis dan Bisnis	Inventarisasi data UPJA	Tersusunnya data UPJA baik dari aspek organisasi, teknis dan bisnis

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PEMBIAYAAN PERTANIAN
DALAM Mendukung TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN dan PETERNAKAN TAHUN 2014**

No.	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten/Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan skim kredit program (KKP-E dan KUR)	1 Koordinasi dengan instansi terkait	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait.	1. Koordinasi dengan instansi terkait dan cabang bank pelaksana.	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dan cabang bank pelaksana setempat.	1. Koordinasi dengan instansi terkait dan cabang bank pelaksana.	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dan cabang bank pelaksana setempat.
		2 Identifikasi dan verifikasi calon penerima skim kredit program	2. Tersedianya data petani/keompok tani yang prospektif dibiayai KKP-E dan KUR.	2. Sosialisasi pelaksanaan KKP-E dan KUR kepada petani/keompok tani.	2. Tersedianya data petani/keompok tani yang layak dibiayai KKP-E dan KUR.	2. Sosialisasi pelaksanaan KKP-E dan KUR kepada petani/keompok tani.	2. Tersedianya data petani/keompok tani yang layak dibiayai KKP-E dan KUR.
		3 Penyusunan kebijakan skim kredit program	3. Terlaksananya workshop dan penyempurnaan kebijakan skim kredit program.	3. Identifikasi petani /kelompok tani yang layak dibiayai KKP-E dan KUR.	3. Meningkatnya pemahaman bagi petani/keompok tani, petugas dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan skim KKP-E dan KUR .	3. Meningkatnya pemahaman bagi petani/keompok tani, petugas dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan skim KKP-E dan KUR .	3. Meningkatnya pemahaman bagi petani/keompok tani, petugas dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan skim KKP-E dan KUR .
		4 Penyusunan pedum dan leaflet	4. Meningkatnya pemahaman bagi petani/keompok tani, petugas dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan skim KKP-E dan KUR baik di pusat dan daerah.	4. Pendampingan dan pengawalan petani/keompok tani untuk akses kepada cabang bank pelaksana setempat.	4. Meningkatnya pemanfaatan KKP-E dan KUR untuk tanaman pangan.	4. Pendampingan dan pengawalan petani/keompok tani untuk akses kepada cabang bank pelaksana setempat.	4. Meningkatnya pemanfaatan KKP-E dan KUR untuk tanaman pangan.
		5 Workshop, Sosialisasi dan apresiasi dalam rangka fasilitasi pemanfaatan skim kredit program (KKP-E dan KUR)	5. Tersedianya pedum dan leaflet KKP-E dan KUR untuk sektor pertanian	5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan skim KKP-E dan KUR	5. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan KKP-E dan KUR	5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan skim KKP-E dan KUR	5. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan KKP-E dan KUR
		6 Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan dan pengembangan skim kredit program (KKP-E dan KUR)	6. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan KKP-E dan KUR				
2	Fasilitasi Pengembangan pembiayaan Agribisnis	1 Koordinasi dengan instansi terkait	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait.	1. Koordinasi dengan instansi terkait	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	1. Koordinasi dengan instansi terkait	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PEMBIAYAAN PERTANIAN
DALAM Mendukung TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

No.	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten/Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
		2 Identifikasi dan verifikasi desa dan gapoktan PUAP 3 Penyusunan kebijakan sistim pembiayaan pertanian. 4 Pembekalan fasilitator pembiayaan petani (FPT) 5 Penyusunan pedum, juknis dan leaflet. 6 Penyaluran dana BLM-PUAP untuk 3.500 gapoktan PUAP	2. Tersedianya data desa dan gapoktan 3. Terlaksananya workshop dan penyusunan kebijakan pembiayaan 4. Meningkatnya pemahaman bagi petani/keompok tani, petugas dan stakeholders lainnya 5. Tersedianya pedum dan leaflet untuk sektor pertanian 6. Tersalurnya dana PUAP	2. Sosialisasi pelaksanaan PUAP 3. Pendampingan dan pengawalan petani/keompok tani untuk akses kepada cabang bank pelaksana setempat. 4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan pembiayaan agribisnis	2. Tersedianya data petani/keompok tani yang layak dibiayai 3. Meningkatnya pemahaman bagi Gapoktan, petugas dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan PUAP . 4. Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan pertanian. 5. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan PUAP	2. Sosialisasi pelaksanaan PUAP 3. Identifikasi petani /kelompok tani yang layak dibiayai 4. Pendampingan dan pengawalan petani/keompok tani untuk akses kepada cabang bank pelaksana setempat. 5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan PUAP	2. Tersedianya data petani/keompok tani yang layak dibiayai 3. Meningkatnya pemahaman bagi petani/keompok tani, petugas dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan PUAP 4. Meningkatnya pemanfaatan sumber pembiayaan petani. 5. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan PUAP
		7 Workshop, Seminar, Sosialisasi dan apresiasi dalam rangka fasilitasi pengembangan PUAP 8 Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan dan pengembangan PUAP	7. Terlaksananya Workshop, Seminar, Sosialisasi dan apresiasi dalam rangka fasilitasi pengembangan PUAP 8. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan penyaluran dana PUAP				
3	fasilitasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	1 Koordinasi dengan instansi terkait 3 Penyusunan data base LKM-A 4 Sosialisasi dan apresiasi dalam rangka penumbuhan LKMA Gapoktan PUAP	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait. 2. tersedianya data base LKMA 3. Meningkatnya pemahaman bagi petani/keompok tani/gapoktan , petugas dan stakeholders lainnya dalam penumbuhan dan pengembangan LKM A Gapoktan PUAP	1. Koordinasi dengan instansi terkait 2. Identifikasi LKM -A 3. Pendampingan dan pengawalan petani/keompok tani untuk akses kepada cabang bank pelaksana setempat. (Apresiasi pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP)	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait 2. tersedianya data LKM A . 3. Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan pertanian, tumbuh dan berkembangnya LKM-A Gapoktan PUAP	1. Koordinasi dengan instansi terkait 2. Identifikasi LKM -A 3. Pendampingan dan pengawalan petani/keompok tani untuk akses kepada cabang bank pelaksana setempat. (Apresiasi pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP)	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait 2. tersedianya data LKM A . 3. Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan pertanian, tumbuh dan berkembangnya LKM-A Gapoktan PUAP

**INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASPEK PEMBIAYAAN PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2014**

No.	Aspek	Pusat		Propinsi		Kabupaten/Kota	
		Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan
4	Pemanfaatan dan pengembangan pola pembiayaan syariah.	1 Koordinasi dengan instansi terkait	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait.	1. Koordinasi dengan instansi terkait dan cabang bank pelaksana.	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dan cabang bank pelaksana setempat.	1. Koordinasi dengan instansi terkait dan cabang bank pelaksana.	1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dan cabang bank pelaksana setempat.
		2 Pemetaan lembaga keuangan syariah	2. Tersedianya data petani/kelompok tani yang prospektif dibiayai sistim syariah	2. Sosialisasi pelaksanaan pembiayaan syariah kepada petani/kelompok tani.	2. Tersedianya data petani/kelompok tani yang layak dibiayai	2. Sosialisasi pelaksanaan pembiayaan syariah kepada petani/kelompok tani.	2. Tersedianya data petani/kelompok tani yang layak dibiayai
		3 Fasilitasi pemanfaatan dana PKBL-BUMN	3. Tersedianya data petani/kelompok tani yang prospektif dibiayai PKBL BUMN	3. Sosialisasi pelaksanaan pembiayaan PKBL BUMN kepada petani/kelompok tani.	3. Tersedianya data petani/kelompok tani yang layak dibiayai	3. Sosialisasi pelaksanaan pembiayaan PKBL BUMN kepada petani/kelompok tani.	3. Tersedianya data petani/kelompok tani yang layak dibiayai
		4 Penyusunan kebijakan perlindungan usaha pertanian	4. Meningkatnya pemahaman bagi petani/kelompok tani, petugas dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan pembiayaan syariah baik di pusat dan daerah.	4. Pendampingan dan pengawalan petani/kelompok tani untuk akses kepada cabang bank pelaksana setempat.	4. Meningkatnya pemanfaatan KKP-E dan KUR untuk tanaman pangan.	4. Pendampingan dan pengawalan petani/kelompok tani untuk akses kepada cabang bank pelaksana setempat.	4. Meningkatnya pemanfaatan KKP-E dan KUR untuk tanaman pangan.
		5 Penyusunan pedum dan leaflet.	5. Tersedianya pedum dan leaflet Syariah untuk sektor pertanian	5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan skim pembiayaan syariah	5. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembiayaan syariah	5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan skim pembiayaan syariah	5. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembiayaan syariah
		6 Workshop, Sosialisasi dan apresiasi dalam rangka fasilitasi pengembangan pola pembiayaan syariah.	6. terlaksananya persamaan persepsi				
		7 Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan pembiayaan syariah.	7. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembiayaan syariah				
		8 Pemanfaatan dan pengembangan pola pembiayaan syariah.					

JADWAL PALANG

JADUAL PALANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERLUASAN TANAMAN PANGAN (SAWAH) TA 2014

NO	JENIS KEGIATAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
I	PERSIAPAN												
1	Sosialisasi, Pendaftaran Ulang	■											
2	Pengajuan Surat Permohonan dan Kesanggupan dari Kelompok Tani	■	■										
3	Penetapan Petani		■										
4	Penetapan Lokasi		■										
5	Pembuatan RUKK		■										
6	Penandatanganan Naskah Kerja sama		■	■									
7	Pengajuan SPM Transfer		■	■									
8	Pembukaan Rekening		■	■									
9	Pembuatan Dokumentasi			■	■						■		
II	LAND CLEARING												
1	Pembabatan semak belukar			■									
2	Penebangan pohon – pohonan			■	■								
3	Pemotongan/ perencekan			■	■								
4	Pembersihan lahan			■	■	■							
III	PENGOLAHAN TANAH												
1	Penggemburan tanah					■							
2	Pembuatan bangunan konservasi					■	■						
3	Pemadatan lereng talud teras					■	■						
IV	SARANA												
1	Pembuatan JUI						■	■					
2	Pembuatan drainase						■	■					
3	Pembuatan pematang batas						■	■					
4	Penyiapan tanah siap tanam							■	■				
5	Tanam								■	■			
6	Serah Terima Pekerjaan									■	■		
V	MONITORING	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VI	EVALUASI					■			■				■

JADUAL PALANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIBUNNAK TA. 2014

NO	JENIS KEGIATAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
I	PERSIAPAN												
1	Sosialisasi, Pendaftaran Ulang	■											
2	Pengajuan Surat Permohonan dan Kesanggupan dari Kelompok Tani	■	■										
3	Penetapan Petani		■										
4	Penetapan Lokasi		■										
5	Pembuatan RUKK		■										
6	Penandatanganan Naskah Kerja sama		■										
7	Pengajuan SPM Transfer		■	■									
8	Pembukaan Rekening		■										
9	Pembuatan Dokumentasi			■	■						■		
II	LAND CLEARING												
1	Pembabatan semak belukar			■									
2	Penebangan pohon – pohonan			■	■								
3	Pemotongan/ perencekan			■	■								
4	Pembersihan lahan			■	■								
III	PENGOLAHAN TANAH												
1	Penggemburan tanah					■							
2	Pembuatan bangunan konservasi					■	■						
3	Pemadatan lereng talud teras					■	■						
IV	SARANA												
1	Pembuatan JUT						■	■					
2	Pembuatan drainase							■	■				
3	Pembuatan pematang batas							■	■				
4	Penyiapan tanah siap tanam								■	■			
5	Tanam									■	■		
6	Serah Terima Pekerjaan										■	■	
V	MONITORING	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VI	EVALUASI				■				■				■

FORM LAPORAN REALISASI

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2014

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran		Fisik		
					(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas.....*)	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan							
	Kab/Kota	1. Jalan Pertanian							
	No. SP DIPA :	2. Optimasi Lahan							
		3. dst							
		B. Pengelolaan Air Irigasi							
		1. Jaringan Irigasi							
		2. Sumber Air							
		3. dst							
		C. Alat dan Mesin Pertanian							
		1. Tractor Roda 2							
		2. Tractor Roda 4							
		3. dst							
		D. Pupuk dan Pestisida							
		1. Penguatan KP3							
		2. Pendampingan Penyaluran BLP							
		3. dst							
		E. Pembiayaan							
		1. PUAP							
		2. dst							
2	Dinas.....*)								
	Kab/Kota								
	No. SP DIPA :								
		1. Jalan Pertanian							
		2. Jaringan Irigasi							
		3. Tractor Roda 4							
		4. dst							
	JUMLAH								

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan

2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau
 E-mail : monevpsp@gmail.com

*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

....., 2014
 Penanggung jawab kegiatan Propinsi

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014

Dinas :
Kabupaten :
Provinsi :
Subsektor :

No.	Kegiatan	Tahun	Target Fisik	Realisasi Fisik	Manfaat
1	2	3	4	5	6

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jak - Sel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
 - c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar $200 \times 2,5 \text{ ton} \times 1,5 = 750 \text{ ton}$

..... 2014
Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

